

Usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

B. Sifat dan Karakteristik Aparatur Sektor Publik

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan tur-bulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

A. Faktor Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi
- Tingkat inflasi
- Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)
- Struktur organisasi
- Tenaga kerja
- Arus modal dalam negeri
- Cadangan devisa
- Nilai tukar mata uang
- Utang dan bantangan luar negeri
- Infrastruktur
- Teknologi
- Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
- Sektor Informasi

b. Faktor Politik

- Hubungan negara dan masyarakat



- Lesi komasi pemerintahan
- Tipe rezim yang berkuasa
- Ideologi negara
- Elit politik dan massa
- Jaringan internasional
- Kelemasaan

c. Faktor kultural

- Keagamaan suku, ras, agama, bahasa dan budaya
- Sistem nilai di masyarakat
- Historis
- Sosiologi masyarakat
- Karakteristik masyarakat
- Tingkat pendidikan

d. Faktor Demografi

- Pertumbuhan penduduk
- Struktur usia penduduk
- Migrasi
- Tingkat kesehatan

e. Value For Money

• Menerapkan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan 3 elemen utama, yaitu

- 1. Ekonomi



⇒ Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan munshin dan pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

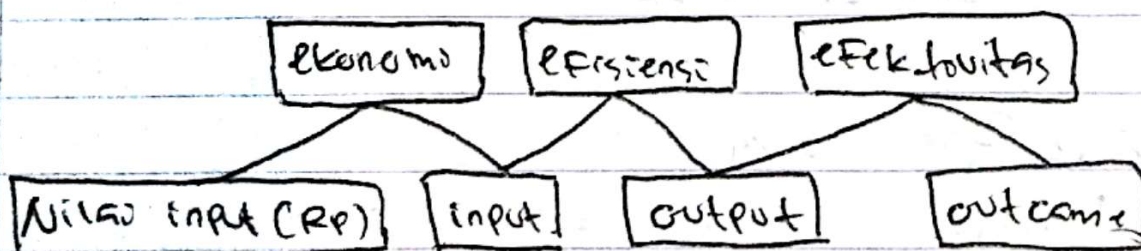
2. Efisiensi

⇒ Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output / input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas

⇒ Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan dengan outcome dengan output

Secara sistematis, value per money disambungkan sbb.



• Input

Merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas. Contoh, dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah dan sebagainya.

 • Output

Merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas kebijakan.

 • Sajian antara (Through Part)

Jumlah operasi yang dilakukan di rumah sakit merupakan throughput bukan output. Output yang lebih tinggi yang hendak dicapai di rumah sakit adalah memperbaiki kesehatan masyarakat, meningkatkan angka harapan hidup, dsb.

 • Outcome

Adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat.

 D Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta

 1. Tujuan organisasi

- Sektor Publik : Nonprofit motive

- Sektor Swasta : Profit motive



2. Sumber Pembiayaan

- Sektor publik: Pajak, retribusi, utang, obligasi, pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara
- Sektor swasta: Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva,
- Pembiayaan eksternal: Utang bank, obligasi,
- Penerbitan saham.

 3. Pola Pertanggungjawaban

- Sektor publik: Pertanggungjawaban masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPD)
- Sektor swasta: Pertanggungjawaban kepada saham dan kreditor

 4. Struktur organisasi

- Sektor publik: Birokrasi, kaku, dan hierarkis
- Sektor swasta: Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional

 5. Karakteristik Anggaran

- Sektor publik: terbuka untuk publik
- Sektor swasta: tertutup untuk publik

 6. Stakeholder yang dipengaruhi

 7. Sistem Akuntansi

- Sektor publik: Cash Accounting
- Sektor swasta: Accrual Accounting



1. Tujuan Organisasi

Tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba tetapi pemberian pelayanan publik (public service), seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

 2. Sumber Pembiayaan

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for services, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor swasta sumber pembiayaan

dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan eksternal

Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (retained earning) dan modal pemilik

Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana

dari publik.

 3. Pola Pertanggungjawaban

Sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan.

Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari



Masyarakat (public fund).

4. Struktur Organisasi

-- Pada sektor publik bersifat kaku dan hirarkis. Sedangkan sektor swasta lebih fleksibel.

E. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glyn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis, atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pendelegasian management
2. Memberikan informasi yang memungkinkan basis manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewangannya dan memungkinkan basis pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

F. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

G. Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

Governance diartikan cara mengelola urusan-urusan publik.

H. Akuntabilitas Publik

Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (Asent) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan menanggung

kerugian serta aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principals) yang memiliki

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

2. Akuntabilitas Proses

3. Akuntabilitas Program

A Akuntabilitas Kebijakan

J. Otonomi Daerah

